

Pengantar Manajemen BUMDes Dan Perencanaan Keuangan BUMDes: Pelatihan Dan Pendampingan Pada BUMDes Tetus Kuanheun

Novising Dewi Astuti¹, Juendiny Chrisna Ekasari Tualaka², Theresia Vera Selviana Assan³

¹Universitas Nusa Cendana, ²Universitas Nusa Cendana, ³Universitas Nusa Cendana

novising.astuti@staf.undana.ac.id, juendiny.tualaka@staf.undana.ac.id, Theresiaassan@gmail.com

Published: Desember, 2025

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tetus Kuanheun dalam memahami prinsip-prinsip dasar manajemen organisasi dan perencanaan keuangan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Sebagai lembaga ekonomi desa, BUMDes memegang peran penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal yang produktif. Namun, berbagai kendala masih ditemukan, seperti lemahnya kemampuan manajerial, ketidakraturan dalam pencatatan transaksi, serta rendahnya literasi keuangan pada tingkat pengurus. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pengelolaan unit usaha dan berisiko menghambat perkembangan ekonomi desa. Melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan yang dirancang berbasis kebutuhan lapangan, tim dosen memperkenalkan konsep manajemen modern, prinsip tata kelola yang baik, serta teknik penyusunan rencana keuangan desa yang sistematis. Metode pembelajaran partisipatif diterapkan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi penyusunan rencana usaha dan proyeksi keuangan, serta bimbingan langsung dalam memahami format laporan keuangan sederhana. Pendekatan ini memungkinkan peserta untuk tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mempraktikkannya sesuai konteks usaha lokal. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan peserta, terutama dalam menyusun rencana kerja, membuat proyeksi pendapatan dan belanja operasional, serta menyusun laporan keuangan sederhana yang relevan bagi operasional BUMDes. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat kapasitas tata kelola BUMDes secara berkelanjutan dan menjadi langkah strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi desa.

Keywords: BUMDes, Manajemen, Perencanaan Keuangan, Pemberdayaan Desa.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas nasional yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Desa tidak lagi hanya dipandang sebagai wilayah administratif, tetapi sebagai satuan masyarakat hukum yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Sugiono (2019) yang menegaskan bahwa desa merupakan *"community with local authority"* yang memiliki dasar legitimasi sosial, budaya, dan hukum untuk mengelola sumber daya lokal secara mandiri. Seiring dengan berjalannya otonomi desa pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah mendorong lahirnya berbagai inovasi ekonomi lokal melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian desa melalui pengelolaan sumber daya lokal yang dimiliki, seperti potensi pertanian, perdagangan, wisata, dan jasa. Melalui BUMDes, pemerintah desa diberi ruang untuk mengelola unit usaha secara mandiri dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini senada dengan pandangan Hutomo (2010) yang menyatakan bahwa pembentukan BUMDes

merupakan upaya strategis dalam membangun kelembagaan ekonomi kolektif di desa untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas ekonomi produktif. Dengan kata lain, BUMDes merupakan lembaga ekonomi desa yang dirancang untuk memperkuat posisi ekonomi masyarakat desa agar tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam pembangunan itu sendiri.

Namun demikian, dalam praktiknya, tidak sedikit BUMDes yang mengalami stagnasi, bahkan berhenti beroperasi karena lemahnya kapasitas manajemen dan perencanaan keuangan. Berbagai penelitian dan evaluasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT, 2023) menunjukkan bahwa sekitar 30% BUMDes di Indonesia belum menjalankan fungsi ekonomi secara optimal. Permasalahan utama yang muncul antara lain: belum adanya sistem manajemen yang terstruktur, kurangnya transparansi keuangan, serta lemahnya kemampuan pengurus dalam menyusun laporan keuangan dan rencana kerja tahunan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Dwiyanto (2015) yang menegaskan bahwa kegagalan tata kelola organisasi publik seringkali tidak disebabkan oleh keterbatasan dana atau fasilitas, tetapi karena rendahnya kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola organisasi secara efektif dan akuntabel. Akibatnya, BUMDes seringkali tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara akuntabel, dan sulit menarik kepercayaan masyarakat desa.

Kelemahan dalam aspek manajemen dan perencanaan keuangan ini menjadi krusial karena BUMDes mengelola sumber daya ekonomi masyarakat. Sebuah organisasi ekonomi yang tidak memiliki rencana keuangan yang baik akan sulit mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Perencanaan keuangan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan kemampuan finansial dan arah strategis organisasi. Selain itu, pencatatan dan pelaporan keuangan yang tertib juga menjadi dasar bagi pengawasan dan evaluasi, baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat sebagai pemilik dana. Dalam kerangka tata kelola publik, Mardiasmo (2007) menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan dana publik, karena menjadi dasar pembentukan kepercayaan publik dan praktik *good governance* pada entitas publik seperti BUMDes.

Dalam konteks akuntansi sektor publik, BUMDes memiliki karakteristik yang unik. Meskipun mengelola usaha layaknya entitas bisnis, BUMDes tetap merupakan lembaga publik yang harus mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang seimbang antara prinsip-prinsip manajemen bisnis dan praktik akuntansi publik. Hal ini menjadi alasan penting mengapa perguruan tinggi, khususnya Program Studi Akuntansi, perlu berperan aktif dalam melakukan pendampingan kepada BUMDes. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dosen dan mahasiswa dapat menyalurkan keilmuan akuntansi untuk memperkuat tata kelola keuangan dan manajerial lembaga ekonomi desa.

Desa Kuanheun, yang terletak di Kabupaten Kupang, merupakan salah satu desa yang memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi berbasis lokal. Desa ini dikenal memiliki sumber daya di bidang pertanian, peternakan, serta usaha perdagangan hasil bumi. Sebagai bentuk implementasi dari kebijakan pemberdayaan ekonomi desa, pemerintah desa telah membentuk BUMDes Tetus dengan tujuan mengelola berbagai unit usaha desa dan menumbuhkan perekonomian masyarakat.

Namun berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi bersama pemerintah desa, ditemukan bahwa pengurus BUMDes masih menghadapi beberapa kendala mendasar dalam pengelolaan manajemen dan keuangan. Beberapa di antaranya adalah belum tersusunnya rencana kerja tahunan secara sistematis, tidak adanya proyeksi pendapatan dan pengeluaran yang jelas, serta lemahnya sistem pencatatan transaksi keuangan. Kondisi ini berdampak pada kurangnya transparansi serta kesulitan dalam melakukan evaluasi kinerja usaha BUMDes. Selain itu, masih banyak pengurus yang belum memahami peran penting perencanaan keuangan dalam menentukan arah dan keberlanjutan usaha desa.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya dilakukan intervensi melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan yang komprehensif, terutama terkait pengantar manajemen BUMDes dan perencanaan keuangan. Materi ini dianggap penting karena menjadi dasar bagi pengurus untuk mengembangkan sistem kerja yang terorganisir dan akuntabel. Melalui pendekatan partisipatif,

kegiatan ini tidak hanya mentransfer pengetahuan teoretis, tetapi juga memberikan praktik langsung tentang bagaimana menyusun rencana keuangan, laporan keuangan sederhana, serta mengatur sistem pengawasan dan evaluasi internal BUMDes.

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh tim dosen Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Cendana ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pengurus BUMDes mengenai fungsi dan prinsip manajemen modern yang dapat diterapkan dalam organisasi ekonomi desa, melatih para peserta agar mampu menyusun rencana keuangan BUMDes yang sistematis, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan usaha desa, serta mendampingi pengurus dalam penyusunan laporan keuangan sederhana yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk tanggung jawab pengelolaan keuangan kepada masyarakat desa dan pemerintah.

Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung tata kelola ekonomi desa yang baik (*good village governance*), meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes, serta memperkuat keberlanjutan usaha desa. Selain manfaat langsung bagi BUMDes Tetus Kuanheun, kegiatan ini juga memberikan pengalaman pembelajaran kontekstual bagi dosen dan mahasiswa akuntansi dalam menerapkan ilmu akuntansi keuangan dan manajemen sektor publik secara nyata di masyarakat.

Secara keseluruhan, kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat dalam upaya memperkuat kapasitas lokal menuju kemandirian ekonomi desa. Dengan membangun pondasi manajemen dan keuangan yang kuat, diharapkan BUMDes Tetus Kuanheun dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi yang profesional, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi contoh bagi desa-desa lain di wilayah Kabupaten Kupang.

METODE

Metode pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian ini disusun secara bertahap dengan pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan mitra, yaitu BUMDes Tetus Desa Kuanheun, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setiap tahapan dilaksanakan secara sistematis dan terukur guna memastikan tercapainya tujuan utama, yaitu peningkatan kapasitas pengurus Badan Usaha Milik Desa Tetus dalam memahami dasar-dasar manajemen BUMDes serta perencanaan keuangan yang efektif dan akuntabel. Peserta kegiatan terdiri dari pengurus BUMDes dan perangkat desa.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, tim dosen melakukan serangkaian kegiatan awal yang dirancang secara sistematis untuk memastikan pelaksanaan pengabdian berlangsung efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengurus BUMDes. Kegiatan ini diawali dengan komunikasi formal antara Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Cendana dan Pemerintah Desa Kuanheun, yang ditindaklanjuti dengan penerimaan surat permohonan resmi terkait pendampingan pengelolaan manajemen dan keuangan BUMDes. Setelah memperoleh arahan dan informasi dasar dari pihak desa, tim dosen melaksanakan survei kebutuhan secara daring melalui media komunikasi seperti telepon, pesan elektronik, serta koordinasi via aplikasi komunikasi online untuk memperoleh gambaran awal mengenai kondisi pengelolaan keuangan, kendala administratif, serta tingkat pemahaman pengurus terhadap prinsip manajerial dan akuntansi.

Selain itu, tim melakukan identifikasi materi pelatihan yang paling relevan dengan situasi lapangan, termasuk pemetaan kompetensi peserta, analisis permasalahan keuangan yang dihadapi, serta pemahaman terhadap struktur organisasi BUMDes Tetus. Proses ini menjadi landasan dalam penyusunan modul pelatihan yang bersifat aplikatif, mulai dari konsep dasar manajemen BUMDes, teknik perencanaan keuangan, hingga praktik penyusunan laporan keuangan operasional yang sederhana. Modul dirancang dengan pendekatan pembelajaran orang dewasa (*andragogi*), di mana materi bukan hanya teoritis, melainkan juga mencakup studi kasus nyata, contoh format pembukuan, simulasi

perencanaan anggaran usaha, dan template laporan keuangan yang dapat langsung diadaptasi oleh pengurus.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan, tim juga menyusun jadwal kegiatan selama pelatihan dan pendampingan serta membagi tugas internal dalam tim—misalnya penanggung jawab materi manajemen, penyusun materi keuangan, fasilitator diskusi, dan dokumentasi kegiatan. Selain itu, dilakukan pula koordinasi teknis dengan aparatur desa terkait fasilitas pelaksanaan seperti ruang pelatihan, perangkat presentasi, kebutuhan administrasi peserta, serta penentuan daftar aparat desa dan pegawai BUMDes yang akan mengikuti kegiatan. Dengan demikian, tahap persiapan ini tidak hanya memastikan kesiapan materi, tetapi juga kesiapan logistik, komunikasi, dan sinergi dengan pemerintah desa sehingga kegiatan pelatihan dapat berjalan secara optimal dan terarah sesuai dengan tujuan pengabdian.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama tiga hari secara intensif dan terarah sesuai rancangan materi pelatihan. Pada hari pertama, kegiatan difokuskan pada pengantar manajemen BUMDes yang mencakup pemahaman peran strategis BUMDes dalam pembangunan ekonomi desa, struktur organisasi yang ideal, pembagian fungsi kepengurusan, dan prinsip dasar manajemen usaha desa. Penyampaian materi disertai diskusi interaktif untuk menggali permasalahan aktual yang dihadapi pengurus dalam pengelolaan organisasi. Selanjutnya, pada hari kedua, peserta mengikuti pelatihan teknis terkait perencanaan keuangan BUMDes seperti penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja BUMDes (RAPBDes), praktik pencatatan transaksi, serta pengelolaan kas operasional. Dalam sesi ini, diberikan contoh format pembukuan, simulasi penyusunan anggaran, dan latihan membuat proyeksi keuangan berdasarkan unit usaha yang ada.

Pada hari ketiga, kegiatan berfokus pada pendampingan langsung dalam penyusunan rencana kerja dan keuangan yang realistis dan kontekstual sesuai potensi lokal BUMDes Tetus Kuanheun. Pendampingan bersifat aplikatif dan personal, di mana tim dosen secara aktif membantu pengurus dalam menerapkan prinsip manajemen dan akuntansi yang telah dipelajari, termasuk penyusunan format pelaporan keuangan, proyeksi pendapatan dan biaya, serta mekanisme evaluasi internal BUMDes. Di akhir pelaksanaan, dilakukan refleksi bersama untuk menilai pemahaman peserta dan menyepakati rencana tindak lanjut pasca kegiatan, sehingga proses penguatan kapasitas pengurus BUMDes dapat terus berlanjut meskipun kegiatan pelatihan telah selesai.

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan secara kualitatif melalui wawancara langsung dengan para peserta untuk menggali sejauh mana pemahaman, manfaat, serta relevansi materi pelatihan diterapkan pada pengelolaan operasional BUMDes. Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk diskusi terbuka dan sesi tanya jawab, di mana pengurus BUMDes menyampaikan kendala yang masih dihadapi serta aspek-aspek yang dirasakan memberikan perubahan positif, terutama dalam penyusunan rencana kerja, pemahaman prinsip manajemen, dan praktik pembukuan keuangan sederhana. Pendekatan evaluasi ini dipilih karena dinilai memberikan ruang bagi peserta untuk menyampaikan pengalaman nyata dan refleksi personal secara lebih mendalam, sehingga tim dosen dapat memperoleh gambaran utuh mengenai efektivitas kegiatan dan kebutuhan tindak lanjut pasca pendampingan.

Melalui pelaksanaan ketiga tahapan tersebut, tujuan utama pengabdian ini dapat dicapai secara optimal. Hasilnya, seluruh kegiatan yang dilakukan selaras dengan kebutuhan dan perkembangan BUMDes.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pelatihan dan pendampingan yang telah dilaksanakan serta pembahasannya dalam konteks peningkatan kapasitas pengurus BUMDes Tetus Kuanheun. Temuan yang diperoleh dipaparkan secara sistematis sesuai dengan tiga tahap utama pelaksanaan pengabdian persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi yang kemudian dianalisis dampaknya terhadap pemahaman manajemen

BUMDes, perencanaan keuangan, serta penerapan praktik tata kelola yang baik dalam operasional BUMDes. Melalui uraian berikut, diharapkan terlihat hubungan antara proses kegiatan dan peningkatan kompetensi peserta sebagai tujuan utama dari program pengabdian ini. Untuk itu, uraian lebih lanjut mengenai capaian konkret pada tahap persiapan dapat dilihat pada bagian berikut.

1. Peningkatan Pemahaman Dasar Pengelolaan Keuangan BUMDes

Pelatihan tahap pertama memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kemampuan dasar para pengurus BUMDes terkait konsep manajemen keuangan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola organisasi ekonomi desa. Pada sesi ini, peserta bukan hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga memahaminya melalui studi kasus sederhana mengenai pencatatan transaksi harian BUMDes. Mereka mulai memahami perbedaan antara aset tetap dan aset lancar, pembedaan kas yang bersumber dari operasional dengan kas dari modal awal, serta cara mengenali kewajiban (utang) dan mencatat pendapatan dari unit usaha BUMDes. Peningkatan kemampuan tersebut terindikasi melalui hasil evaluasi lisan, respon peserta dalam diskusi interaktif, serta akurasi jawaban pada lembar asesmen sederhana—meskipun tidak bersifat formal—yang diberikan pada akhir sesi untuk mengukur tingkat pemahaman praktis mereka terhadap materi.



Gambar 1. Penyampaian materi pengantar manajemen dan prinsip dasar akuntansi BUMDes

2. Penyusunan Perencanaan Usaha dan Proyeksi Keuangan

Pada tahap kedua, peserta mendapatkan pendampingan intensif dalam menyusun rencana usaha dan melakukan simulasi perhitungan proyeksi pendapatan serta biaya operasional secara sistematis. Melalui pendekatan berbasis praktik, peserta dilatih menganalisis potensi unit usaha BUMDes berdasarkan karakteristik permintaan konsumen dan kondisi pasar desa, sehingga draft rencana usaha yang disusun menjadi lebih realistis, kontekstual, dan berorientasi pada peluang bisnis lokal. Tidak hanya itu, penyusunan proyeksi keuangan dilakukan dengan mempertimbangkan asumsi biaya, kapasitas produksi, skenario penjualan, serta faktor risiko yang mungkin mempengaruhi pendapatan usaha. Hasilnya, peserta mampu menghasilkan rencana proyeksi kas masuk, kas keluar, dan estimasi laba yang menggambarkan kinerja keuangan usaha dalam jangka pendek (operasional harian hingga bulanan) maupun jangka panjang (perencanaan tahunan), yang nantinya dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan strategis oleh pengurus BUMDes.



Gambar 2. Simulasi proyeksi pendapatan serta biaya operasional BUMDes

3. Implementasi Format Pencatatan Keuangan dan Tata Kelola

Pada tahap ketiga, peserta diperkenalkan dengan format pencatatan transaksi keuangan yang sederhana namun sistematis, mulai dari jurnal transaksi harian, buku kas umum, hingga penyusunan laporan laba rugi sederhana yang mencerminkan aktivitas usaha secara periodik. Pendampingan dilakukan secara langsung dengan menggunakan transaksi simulasi—baik transaksi penjualan, pembelian, maupun pengeluaran operasional—hingga peserta benar-benar memahami alur pencatatan, pemindahbukuan, dan penyusunan laporan akhir. Melalui latihan praktis ini, peserta mendapatkan pengalaman langsung mengenai bagaimana setiap transaksi dicatat secara konsisten dan diklasifikasikan dengan tepat. Dampaknya, terbentuk pemahaman yang lebih kuat mengenai pentingnya sistem pencatatan yang rapi, verifiabel, dan mudah ditelusuri, sehingga mendukung budaya transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan BUMDes.

FORMAT KEUANGAN BUMDES

- Jurnal
- Buku Kas
- Laporan Keuangan
(Laba Rugi, dll)

**TABLA BUMDES
END UTMARA**
1. GABUNGAN LABA RUGI

Tetap, Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016

KODE	KETERANGAN	2016 (Rp)
PENDAPATAN UTAMA		
<i>Produksi Jasa</i>		
	<i>Produk jasa Perikanan</i> (Jl. Baiti)	Rp 2.000.000,00
	<i>Produk jasa Ternak (KELABUNG, B1 BULU, dan Ternak)</i>	Rp 2.000.000,00
	Total Produksi jasa	Rp 4.000.000,00
BEBAN-BEBAN UTAMA		
	<i>Beban Tangg. Upah dan Sewa</i>	Rp 800.000,00
	<i>Beban Perikanan</i>	Rp 10.000,00
	<i>Beban Perawatan dan perbaikan produksi</i>	Rp 100.000,00
	<i>Beban Perawatan produksi</i>	Rp 100.000,00
	<i>Beban listrik</i>	Rp 10.000,00
	Total beban produksi	Rp 1.020.000,00
LABA RUGI OPERASI		
	<i>Saldo Awal</i>	Rp 3.170.000,00
LABA RUGI OPERASI		
	<i>Saldo Awal</i>	Rp 3.170.000,00
	<i>Saldo Akhir</i>	Rp 3.170.000,00
LABA RUGI OPERASI RUGI RUGI		
	<i>Saldo Awal</i> (PENGHASILAN MEND. BUMDES)	Rp 3.170.000,00
	<i>Saldo Akhir</i> (PENGHASILAN MEND. BUMDES)	Rp 3.170.000,00

Gambar 3. Simulasi Pembuatan Laporan Keuangan

4. Dampak Keseluruhan dan Perubahan yang Terukur

Secara keseluruhan, ketiga tahapan pelaksanaan memberikan peningkatan kapasitas yang nyata bagi pengurus BUMDes dalam aspek manajerial maupun teknis operasional. Melalui proses pelatihan dan pendampingan yang interaktif, peserta tidak hanya memahami konsep dasar akuntansi sederhana dan prinsip pengelolaan usaha, tetapi juga mampu menerapkannya secara konsisten dalam kegiatan operasional BUMDes. Selain itu, terjadi perubahan signifikan dalam pola pikir pengurus yang kini lebih memahami pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang, pengelolaan arus kas yang sehat, serta pencatatan transaksi yang terstruktur. Kegiatan ini turut membangun budaya tata kelola keuangan yang lebih baik, menumbuhkan kesadaran kuat akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Dampak positif ini menjadi landasan awal bagi terwujudnya operasional BUMDes yang lebih profesional dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.



Gambar 4. Dokumentasi akhir kegiatan.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini telah berhasil meningkatkan kapasitas pengurus BUMDes dalam memahami konsep manajemen organisasi dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan berbasis kebutuhan lokal. Peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis mengenai struktur manajemen BUMDes dan prinsip perencanaan keuangan, tetapi juga mampu menerapkannya secara langsung dalam penyusunan rencana kerja, perhitungan proyeksi kas masuk–kas keluar, penyusunan RAPBDes, serta implementasi format pencatatan transaksi dan laporan keuangan sederhana dalam praktik operasional sehari-hari.

Keberhasilan pelatihan ini menunjukkan bahwa intervensi berbasis pendampingan praktik langsung jauh lebih efektif dalam membangun kompetensi pengurus BUMDes dibandingkan pelatihan konseptual semata. Selain itu, kegiatan ini turut membangun budaya tata kelola keuangan yang transparan dan menumbuhkan semangat akuntabilitas publik, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi desa serta memperkuat profesionalisme BUMDes sebagai lembaga ekonomi lokal yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa Tetus Kuanheun yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, mulai dari pemberian izin kegiatan, penyediaan fasilitas tempat, hingga partisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pengurus BUMDes Tetus yang telah menunjukkan komitmen tinggi selama proses pelatihan dan pendampingan, serta secara terbuka berbagi pengalaman dan kondisi riil pengelolaan usaha desa sebagai dasar pemahaman bersama dalam kegiatan ini. Selain itu, penghargaan turut diberikan kepada mahasiswa pendamping Program Studi Akuntansi Universitas Nusa Cendana yang telah membantu dalam pengumpulan data, dokumentasi, fasilitasi teknis selama pelatihan, dan asistensi langsung kepada peserta sehingga kegiatan dapat berjalan dengan baik, efektif, dan tepat sasaran. Secara keseluruhan, dukungan dari seluruh pihak terkait menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan ini dan diharapkan kerja sama serupa dapat berlanjut pada program-program peningkatan kapasitas BUMDes di masa mendatang.

REFERENSI

- Dwiyanto, A. (2015). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hutomo, M. (2010). *BUMDes: Spirit usaha kolektif desa*. Jakarta: Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi.

- Kemendesa PDTT. (2023). *Evaluasi perkembangan BUMDes di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2023). *Panduan pengelolaan BUMDes*. Jakarta: Kemendesa PDTT.
- Mardiasmo. (2007). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Maulana, H., & Hidayat, R. (2022). Peningkatan kapasitas manajemen BUMDes melalui pelatihan keuangan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 45–53.
- Nuryani, E., & Pratiwi, S. (2024). Optimalisasi tata kelola keuangan BUMDes berbasis digital. *Jurnal Akuntansi dan Pemberdayaan Desa*, 3(1), 12–21.
- Sugiyono. (2019). *Pembangunan desa dan otonomi lokal*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.